

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan melakukan kajian lebih lanjut dan terperinci tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Kajian pustaka dalam penelitian ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Kabupaten Belitung”.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dibuat sebagai sebuah perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Pengkajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan wawasan untuk bisa lebih memahami dan memanfaatkan metode maupun landasan teori yang relevan. Kajian pustaka juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi penelitian yang bertujuan pada plagiarisme atau penjiplakan. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis tertuang sebagai berikut:

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
		Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara (Mahadika, Hananto, Indarja) (Deritasari et al., 2014)	Persamaan			
		-	Pendekatan Deskriptif	Metode Kualitatif	-
		Perbedaan			
		-	Deskriptif Analisis	Metode Yuridis Normatif Kualitatif	Dalam Penelitian (M. Deritasari, H. Dwi, Indarja 2014) menggunakan data primer dan data skunder, setelah terkumpul dilakukan analisis data secara kualitatif
2.	Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto) (F. Dwi.C. Nurhadi, S. Rengu 2004) (Dwi et al., 2004)	Persamaan			
		-	Pendekatan Deskriptif	Metode Kualitatif	-
		Perbedaan			
		Dalam penelitian (F. Dwi.C. Nurhadi, S. Rengu 2004) Teori yang digunakan yaitu teori Pembangunan.	-	-	Dalam penelitian (F. Dwi.C. Nurhadi, S. Rengu 2004) Menggunakan pengumpulan dara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.	Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungn. (Widiati, 2016)	Persamaan			
		-	Pendekatan Deskriptif	Metode Kualitatif	-
		Perbedaan			
		Dalam Penelitian (T. Widiati, 2016) menggunakan teori manajemen pengelolaan pariwisata.	-	-	Dalam Penelitian (T. Widiati. 2016) Gabungan dan analisis data bersifat induktif.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun dari ke 3 penelitian terdahulu pada tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahadika Tegar Deritasari, Untung Dwi hananto, Indarja (2014) dengan judul Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, pendekatan deskriptif analisis dan teknik analisis yang digunakan menggunakan data primer dan data skunder, setelah terkumpul dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Peraturan pengembangan pariwisata untuk Kabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Daerah Nomor 163 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. Untuk mengatasi kendala yang ada, Dinas

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan birokrasi untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pengembangan pariwisata pada masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu (2004) dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif dan teknik analisis yang digunakan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun sektor pariwisata masih memiliki beberapa kendala sehingga diperlukan adanya strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pariwisata di daerah terhadap pendapatan asli daerah antara lain, pengembangan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan

usaha pariwisata. Namun di dalam penerapan strategi tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat yang muncul secara internal maupun eksternal.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Widiati Trianingsih (2016) dengan judul Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif, menggunakan teori manajemen pengelolaan pariwisata dan teknik analisis yang digunakan gabungan dan analisis data bersifat induktif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan pengembangan pariwisata menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Bulungan. Selain pemerintah, masyarakat tentunya juga diharapkan aktif berperan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan, dan (2) untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini belum memiliki program pengembangan wisata yang rinci. Pada dasarnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap objek wisata. Akan tetapi, belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata kepada pada saat ini di Kabupaten Bulungan. Selain itu, belum ada regulasi yang jelas mengenai retribusi objek wisata sehingga objek wisata belum dapat

dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat di sekitar objek wisata. Kerjasama ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar objek wisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan terbagi atas faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Faktor penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain keterbatasan anggaran dan belum adanya investor yang tertarik untuk membangun pariwisata Kabupaten Bulungan. pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki kelemahan di beberapa faktor.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya melakukan penelitian secara umum perbedaan dengan penelitian ini dari segi judul maupun isi dan yang membedakannya yaitu upaya dan teori apa yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata, hal lain yang membedakannya yaitu dari strategi dan teori apa yang tertera dalam penelitian yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata untuk mewujudkan program kerja berhasil guna. Dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah pengembangan pariwisata.

2.1.2. Kajian Terhadap Administrasi Publik

A) Definisi Administrasi Publik

Administrasi diartikan sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi diperlukan setiap orang sejak lahir sampai dengan akhir hayatnya. Administrasi selalu dijumpai dalam setiap aspek kehidupan manusia. Contohnya produk administrasi yang diperlukan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lainnya. Dengan demikian setiap individu dalam masyarakat memerlukan administrasi. Administrasi selain diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan dan kerja sama, administrasi juga diartikan sebagai profesi keahlian. Adapun definisi administrasi menurut beberapa para ahli sebagai berikut;

Menurut **Chander dan Plano** dalam **Keban (2004:3)** mengemukakan bahwa: “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam publik”.

Sementara itu, menurut **Henry dalam Harbani Pasolong (2008:8)**, mengemukakan bahwa:

“administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari kedua para ahli diatas bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang mengkombinasikan secara

kopleks antara teori dan praktik dimana sumber daya dan personal publik yang berhubungan dengan masyarakat/publik yang diperintah agar mendorong kebijakan-kebijakan publik supaya lebih respon terhadap kebutuhan sosial masyarakatnya. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sedangkan menurut **Waldo dalam Pasolong (2008:8)** mendefinisikan “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. (*Wolfman, 2013*)

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian para ahli diatas adalah kejasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

B) Fungsi-Fungsi Administrasi Publik

Menurut **Tjiptoherijanto dan Manurung (2010:113)**, terdapat tiga fungsi utama administrasi publik, yaitu;

(1) Formulasi kebijakan, memiliki empat subfungsi yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan

tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi, antar sektor dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintah yang kesemuanya itu amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera.

(2) Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi, tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan menjalankan tugas-tugas rutin dan kemampuan merespons perkembangan eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial, teknologi dan perkembangan-perkembangan internasional.

(3) Penggunaan Dinamika Administrasi. Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi. Jika pengaturan pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

C) Paradigma Administrasi Publik

Henry yang dikutip oleh **Pasolong (2008: 28-30)** mengemukakan ada lima paradigma administrasi publik, yaitu:

(1) Paradigma pertama: Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937). Lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, yang dipentingkan fokusnya yaitu: “prinsip-prinsip administrasi” yang dipandang

dapat berlaku secara universal, ada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini (1927-1937) administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja. Walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya.

(2) Paradigma kedua: Dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926). Fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik dan kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara berbeda. Pada masa ini, dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara.

(3) Paradigma ketiga: Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970). Pada masa ini, secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan administrasi politik. Konsekuensi dan usaha ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial.

(4) Paradigma keempat: Administrasi negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970). Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas kedua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi

tidak pada lokusnya. Usaha pengembangan, terutama diperoleh dari pengaruh fakultas ilmu administrasi (*school of business administration*) mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. Pada tahun 1956 terbitlah jurnal *Administrative Science Quarterly*, sebagai sarana yang amat penting untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi-konsepsi dari paradigma ini.

(5) Paradigma kelima: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara masa ini terjadi setelah tahun 1970, pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu menambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik. Dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi negara dan *public affairs* bermunculan. Salah satu trend dari pertumbuhan administrasi negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut (*The National Association of School of Public Affairs and Administration*). Pada tahun 1980 asosiasi ini telah mempunyai anggota lebih dari 200 institusi dan lebih dari 25.000 mahasiswa baik yang penuh ataupun yang parttime terdaftar dalam program MPA (*Master of Public Administration*) pada akhir tahun 1970.

2.1.3. Kajian Terhadap Strategi

A) Pengertian Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu

“*strato*” yang artinya pasukan dan “*agensi*” yang artinya pemimpin. Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strato*” yang artinya pasukan dan “*agensis*” yang artinya pemimpin. Jadi, strategi berarti hal yang berhubungan dengan pasukan perang. Menurut **Marrus (2002:31)** strategi didefinisikan sebagai “suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai”. (*Eprints.uny.ac.id, 2002*)

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian para ahli diatas bahwa strategi adalah sebuah proses kegiatan yang menentukan rencana pada sebuah organisasi dengan tujuan yang akan direncanakan dan disertai dengan penyusunan cara-cara, upaya, usaha bagaimana suatu tujuan dapat dicapai oleh seorang pemimpin.

Menurut **Quinn (1999:10)** mengartikan strategi adalah “suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh”. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan serta kessatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Jadi dapat disimpulkan pengertian menurut para ahli diatas bahwa strategi adalah sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan dan

tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- (a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- (b) Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- (c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- (d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- (e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- (f) Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- (g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

B) Peran Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peran yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang

diinginkan tercapai. Menurut **Grant (1999:21)** strategi memiliki tiga peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

(a) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

(b) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.

(c) Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masalah yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

C) Manfaat Strategi

Menurut **Greenly** dalam bukunya **David** akan membawa manfaat-manfaat sebagai berikut ini; (a) Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang (b) memberikan pandangan yang obyektif atas masalah manajemen (c) mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas control dan koordinasi yang baik (d) Meminimalkan efek dari kondisi perubahan yang jelek (e) memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan baik tujuan

yang telah ditetapkan (f) Memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk peluang yang lebih teridentifikasi (g) Memungkinkan alokasi sumberdaya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana (h) menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal staf (i) membantu mengintegrasikan perilaku individu dalam usaha bersama (j) Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu (k) Mendorong pemikiran ke masa depan atau lebih inovatif (l) menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang (m) Mendorong terciptanya sikap positif terhadap perubahan. (*Nasta'in, 2017*)

D) Jenis-Jenis Strategi

Terdapat lima jenis strategi, yaitu:

(a) Strategi penetrasi pasar. Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban.

(b) Strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada

konsumen. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

(c) Strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu untuk membawa produk kearah pasar baru dengan membuka atau mendirikan atau anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah dapat meningkatkan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.

(d) Strategi intergrasi. Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan.

(e) Strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diservikasi konglomerat. Diversivikasi yang dimaksud disini adalah perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perusahaan kepada kelompok konglomerat (korporat).

2.1.4. Kajian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A) Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah “hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang diatas bahwa semua yang terdapat didalam suatu daerah yang telah diakui merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pemerintah daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012;101). Berdasarkan penjelasan dari **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah “salah satu sumber dana pembiasayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (*Darmawan, 2019*)

Jadi, dapat disimpulkan menurut pengertian para ahli diatas bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dpungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya itu sendiri berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Menurut **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6**, Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

(a) Pajak Daerah

Yang dimaksud dengan pajak daerah sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pajak pada umumnya, perbedaaan terletak pada siapa

pemungut atau yang menyelenggarakan administrasi pajak dan dasar hukum pengenaan pajak tersebut. Adapun pengertian pajak daerah menurut **Siagian** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Daerah** Sebagai Keuangan Daerah yang penulis kutip dalam buku **Tjip Ismail** yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pengertian pajak daerah adalah “Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang”. (*T.Ismail,2010*)

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian para ahli diatas bahwa pajak daerah pajak yang diterima oleh negara dan diserahkan kepada daerah sehingga di sebut sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Adapun menurut **Undang-Undang No. 11 Tahun 1957 (Undang-Undang Pajak Daerah) Pasal 2** yang penulis kutip dalam buku **Tjip Ismail** yang berjudul **Pajak Daerah** dan Retribusi Daerah dinyatakan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkannya guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.

Jadi dapat disimpulkan menurut Undang-Undang diatas bahwa pajak daerah adalah pungutan yang diambil oleh daerah menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan guna membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut **Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 18 tahun 1997** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 34 Tahun 2000** tentang **Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997** tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** disebutkan bahwa pajak daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah”. Berdasarkan **pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000** jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan golongan C, pajak parkir.

Adapun pengertian pajak daerah menurut pendapat dan sepengetahuan penulis adalah sebagai suatu kontribusi kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah yang terutang oleh yang wajib membayarnya (yang bersifat memaksa) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang akan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

(b) Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi

daerah juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, misalnya: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, misalnya; retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus

parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produk usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya: retribusi mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek.

(c) Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah (OTDA)

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu '*autos*' yang berarti 'sendiri' dan '*nomos*' yang berarti 'aturan'. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut **Abdullah 2002** dalam buku **Yaya Mulyana A. Aziz** yang berjudul **Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Upaya Membangun Daya Saing**

Pemerintahan Daerah) mendefinisikan otonomi daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan rerundang-undangan”. (*Y. Aziz,2016*)

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas menurut para ahli bahwa otonomi daerah hak yang diberikan pusat kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga

mereka dapat beradaptasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakkan dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah dalam daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan **Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang **Pemerintahan Daerah**, daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia **Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004** tentang **Pemerintahan Daerah**”.

b. Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pertama yang mengatur otonomi daerah adalah **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948** tentang **pokok-pokok pemerintahan sendiri didaerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri**.

Menurut penjelasan **Undang-Undang No. 32 tahun 2004** tentang **Pemerintahan Daerah**, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyatanya adalah satu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya otonomi daerah, yaitu memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air secara merata tanpa ada pertentangan, sehingga pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Melalui otonomi daerah juga diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang dalam memajukan daerahnya dengan melakukan indentifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif dan wajar.

Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah** dan **Undang-Undang nomor 23 tahun 2004** tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** yang berorientasi pada kepentingan pelayanan publik (*public oriented*). Pengelolaan sumber-sumber keuangan lebih banyak didesentralisasikan kepada daerah sehingga menuntut pemahaman yang lebih luas dalam memahami pola pengelolaan keuangan publik. daerah mendapat kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan baik untuk pengelolaan sumber-sumber keuangannya maupun untuk belanja daerah sebagai dampak dari penyelenggaraan otonomi daerah. (*E. Larasati, 2011*)

2.1.5. Kajian Terhadap Pariwisata

A) Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari: '*pari*' yang berarti 'penuh, lengkap, berkeliling' '*wis (man)*' yang berarti 'rumah, properti, kampung, komunitas dan '*ata*' berarti 'pergi terus-terusan, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi suatu kata melahirkan rumah (*kampong*) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Menurut **Kurt Morgenroth**, pariwisata dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut, bahwa;

“Pariwisata adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiat ditempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan

kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya”.

Jadi, dapat disimpulkan dari definisi menurut para ahli diatas bahwa pariwisata secara singkat adalah keluar masuknya orang-orang ke suatu tempat ke tempat lainnya semata-mata hanya sebagai konsumen dari hasil perekonomian dan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan budaya atau hanya sebagai suatu keinginan pribadi yang meninggalkan tempat tinggal aslinya untuk sementara waktu.

Menurut **Hunzieker** dan **Krapf** pariwisata dapat didefinisikan sebagai berikut, bahwa; “Sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara”.

Berdasarkan **Undang-Undang No.10 tahun 2009** tentang **Kepariwisataan** yang dimaksud dengan pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. (*Syafri, Edi; Endrizal, 2013*)

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang diatas bahwa segala sesuatu atau keadaan yang ada di Indonesia sebagai karunia yang diberikan tuhan yang Maha Esa, berupa flora dan fauna, serta peninggalan sejarah seni dan budaya yang ada merupakan sumber daya dan sebagai sumber modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat setempat.

Menurut **Mathieson** dan **Wall**, mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama yaitu:

- (a) *A dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata;
- (b) *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan; dan
- (c) *A consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. (*Yurleni, 2018*)

Jadi, dapat disimpulkan menurut pemahaman para ahli diatas bahwa tiga elemen utama pariwisata adalah suatu perjalanan wisata ke suatu tempat yang ingin dikunjungi yang akan disinggahi pada suatu daerah atau tujuan, sehingga membuat suatu daerah masyarakat lokal yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari wisatawan. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya, seperti kewajiban pemerintah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata.

B) Bentuk-Bentuk Pariwisata

Menurut **Mujadi (2009: 7-10)** bentuk-bentuk pariwisata secara umum, antara lain:

(1) Menurut jumlah orang yang bepergian

- a. Pariwisata individu/perorangan (*individual tourism*). Bila seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukan sendiri atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukansendiri dan memilih daerah tujuan wisata beserta programnya serta pelaksanaannya dilakukan sendiri.
- b. Pariwisata kolektif (*collective tourism*) suatu usaha perjalanan wisata yang menjual pakatnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya.

(2) Menurut motivasi perjalanan

- a. Pariwisata rekreasi (*recreation tourism*) bentuk pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan.
- b. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk menikmati hiburan dan lain-lain.
- c. Pariwisata budaya (*culture tourism*) bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat negara lain, studi-studi/riset pada penemuan-penemuan, mengunjungi tempat-tempat peninggalan kuno/bersejarah dan lain-lain.

d. Pariwisata olahraga (*sports tourism*) bentuk pariwisata ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori: *Pertama: Big Sports Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar yang menarik perhatian, baik olahragawannya sendiri maupun penggemar (*supporter*). *Kedua: Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu bentuk olahraga bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti: mendaki gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.

e. Pariwisata untuk urusan usaha (*business tourism*) bentuk pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis, tetapi dalam perjalanannya hanya untuk melihat eksibisi atau pameran dan sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk menikmati atraksi di negara yang dikunjungi.

f. Pariwisata untuk tujuan konvensi (*convention tourism*) bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghadiri pertemuan ilmiah seprofesi dan politik. Tempat konferensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, modern dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta peralatannya, penginapan dan lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan tour (kunjungan wisata).

(3) Menurut waktu berkunjung

a. *Seasonal tourism* pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk dalam kelompok ini musim panas (*summer tourism*) dan musim dingin (*winter tourism*).

b. *Occasional tourism* kegiatan pariwisata yang diselenggarakan dengan mengkaitkan kejadian atau event tertentu.

(4) Menurut objeknya

a. *Cultural tourism* jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah/tempat, seperti peninggalan nenek moyang, benda-benda kuno dan sebagainya.

b. *Recuperational tourism* orang-orang yang melakukan perjalanan wisata bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit.

c. *Commercial tourism* perjalanan yang dikaitkan dengan perdagangan seperti penyelenggaraan expo, fair, exhibition dan sebagainya.

d. *Political tourism* suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.

(5) Menurut alat angkutan

a. *Land tourism* jenis pariwisata yang di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kendaraan darat seperti bus, kereta api, mobil pribadi atau taksi dan kendaraan darat lainnya.

b. *Sea or river tourism* kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi air seperti kapal laut, ferry dan sebagainya.

c. *Air tourism* kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.

(6) Menurut umur

a. *Youth tourism* atau wisata remaja jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja dan pada umumnya dengan harga relatif murah dan menggunakan sarana akomodasi *youth hostel*.

b. *Adult tourism* kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang berusia lanjut. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang menjalani masa pensiun.

C) Sistem Pariwisata

Menurut **Jordan dalam Liper**, sistem pariwisata adalah “tatanan komponen dalam industri pariwisata dimana masing-masing komponen saling berhubungan dan membentuk sesuatu yang bersifat menyeluruh”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pariwisata menurut para ahli di atas adalah sebuah komponen-komponen struktur yang tersusun dalam sebuah industri pariwisata dimana pada sebuah komponen-komponen yang saling berhubungan dibentuk sehingga menjadikan suatu yang bersifat menyeluruh.

Adapun sistem pariwisata menurut **Hall dalam Suryadana dan Octavia** terdiri dari dua bagian besar yaitu *supplu* dan *demand* dimana masing-masing bagian merupakan subsistem yang saling berinteraksi erat satu sama lain.

Subsistem *demand* (pemerintaan) berkaitan dengan budaya wisatawan sebagai individu. Latar belakang pola perilaku wisatawan dipengaruhi oleh motivasi baik fisik, sosial, budaya, spiritual, fantasi dan pelarian serta didukung oleh informasi, pengalaman sebelumnya dan kesukaan yang membentuk harapan dan image, motivasi, informasi.

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli di atas bahwa sistem pariwisata antara persediaan dan permintaan merupakan bagian subsistem yang berkaitan dan saling berinteraksi yang mempunyai kaitan erat satu sama lain, dimana permintaan berkaitan dengan budaya wisatawan sebagai seorang individu. Perilaku wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik fisik, sosial, budaya, spiritual, fantasi dan pelarian serta didukung oleh informasi, pengalaman-pengalaman sebelumnya dan suatu kesukaan yang hingga membentuk harapan-harapan dan gambaran. Pengalaman sebelumnya kesukaan, harapan dan image wisatawan merupakan komponen dari subsistem permintaan sebagai bagian dari sistem pariwisata. *Supply* sebagai subsistem dari sistem pariwisata terdiri dari komponen seperti industri pariwisata yang berkembang, kebijakan pemerintah baik nasional, bagian regional maupun lokal, aspek sosial budaya serta sumber daya alam dimana masing-masing sub sistem sebenarnya juga merupakan sistem tersendiri yang berinteraksi ke dalam dan keluar. Baik *supply* maupun *demand* akan mempengaruhi pengalaman yang terbentuk selama melakukan aktivitas wisata.

D) Jenis-Jenis Wisata

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

(a) Wisata alam, yang terdiri dari:

1. Wisata Pantai (*Marine Tourism*), merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
2. Wisata Etnik (*Etnik Tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
3. Wisata cagar alam (*Ecoturismi*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran bahwa udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
4. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
5. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkrbunan dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitarnya.

(b) Wisata Soaial-Budayan yang terdiri dari:

1. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle field*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.

2. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, maupun dengan tema khusus lainnya.

E) Kebijakan Pengembangan Pariwisata

(1) Kebijakan Pokok;

a. Mewadahi, membangun dan juga mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja.

b. Meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi daripada sebagai fasilitator regulator yang bisa menjadi pengembangan pariwisata.

c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan seorang dalam mengembangkan kawasan wisata.

d. Mengantarkan kerjasama pariwisata antar daerah dan juga dunia usaha.

(2) Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata

a. Memberikan arahan yang jelas agar menjadi pengembangan pariwisata berdasarkan karakteristik keuangan melalui zonasi pengembangan.

b. Untuk kemudahan pembangunan dan pengolahan yang perlu dilakukan adalah pengelompokan obyek daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan –satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan agar mempunyai ketertarikan sirkuit atau jalur wisata.

c. Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan juga daya tarik wisata.

(3) Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek pemanfaatan dan pengendalian yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus sesuai dengan dasar-dasar pada sistem perencanaan.

b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan dasar pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata dengan nuansa agama, budaya estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat.

c. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan juga wisata petualangan.

(4) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata

a. menyiapkan sistem perencanaan tata ruang kawasan wisata.

b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata.

c. Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komunikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.

d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan juga fasilitas penunjang lainnya.

F) Tujuan dan Manfaat Kepariwisata

Kepariwisata merupakan sebuah kegiatan usaha dalam melayani kebutuhan atau memenuhi keinginan seorang wisatawan yang akan memulai atau sedang dalam melakukan sebuah perjalanan wisata. Menurut **Oka A. Youti** dalam bukunya '**Pengantar Ilmu Kepariwisata**' yang menyatakan bahwa: "Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha ataupun untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi hanya untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam".

Setelah kita mengetahui berbagai macam pengertian mengenai ‘Kepariwisataan’ dari berbagai macam sumber yang telah memudahkan kita semua dalam memahami apa itu kepariwisataan secara baik yanpa merasa ragu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu pengertian dari kepariwisataan masih ada tujuan serta manfaatnya sesuai dengan intruksi **Presiden No, 9 Tahun 1969** yang dikutip dari buku ‘**Perencanaan Pengembangan Pariwisata**’ oleh **Oka A. Youti (1997: 35)** dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya pendapatan negara serta masyarakat pada umumnya. Memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
- (b) Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- (c) Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional.

G) Sarana dan Prasarana Pariwisata

Menurut **Sinarta (2010: 26)** sarana pariwisata adalah “segala kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya yaitu terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan”.

Prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sehingga memudahkan para wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sarana kepariwisataan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

(1) Sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructure*) adalah sarana yang berfungsi untuk memberikan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan

(2) Sarana pelengkap kepariwisataan (*supplementing tourism super structure*) adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dan membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata yang dikunjungi.

(3) Sarana penunjang (*supporting tourism superstructure*) adalah perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap, berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata, tetapi juga membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan uang ditempat yang dikunjungi.

Dan kelompok prasarana dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

(1) Prasarana umum yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak (umum) bagi perekonomiannya dan termasuk didalamnya adalah system penyediaan: air bersih, kelistrikan, jalur lalu lintas, sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi.

(2) Kebutuhan pola hidup modern misalnya rumah sakit, apotek, pusat-pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan dan pomp bensin.

(3) Prasarana wisata meliputi tempat penginapan, tempat informasi wisatawan, kantor informasi dan promosi dikenal dengan tourism informasi center (TIC), tempat-tempat rekreasi dan sport, sarana transportasi penunjang.

H) Manfaat Pariwisata

Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) Ekonomi

Manfaat pariwisata dari segi ekonomi adalah pariwisata menghasilkan devisa besar bagi negara, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Selain itu, pariwisata juga menciptakan peluang kerja lebih besar dan memberikan kesempatan kerja lebih tinggi. Dengan adanya pariwisata, banyak sarana-prasarana yang dibutuhkan guna mendukung pariwisata yang ada. Dengan demikian, jelas adanya pariwisata secara signifikan berpengaruh pada peningkatan perekonomian, baik negara ataupun masyarakat sendiri.

(b) Budaya

Perkembangan pariwisata dalam suatu daerah tertentu mau tidak mau akan membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi para pengunjung wisata dengan masyarakat lokal. Dari interaksi ini nantinya para

wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat serta latar belakang kebudayaan lokal yang dianut. Dengan demikian, para pengunjung akan lebih memahami berbagai budaya dalam suatu obyek wisata tertentu yang menjadikan mereka lebih toleran dengan busaya yang berbeda-beda.

2.1.6. Kajian Terhadap Pengembangan Pariwisata

A) Pengertian Pengembangan Pariwisata

Menurut **Darminta (2002: 474)** dalam **Wulandari (2015: 17)** pengembangan adalah “proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna dan berguna. Pengembangan pariwisata menurut **Pearce (1981: 12)** dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut **Barreto dan Giantari (2015: 34)** Pengembangan pariwisata adalah “suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya”.

Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat

banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Menurut **Sastrayuda (2010: 6-7)** dalam perencanaan pengembangan meliputi:

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalaha meberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.

4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada. (*Eprints.polsri.ac.id, 2015*)

B) Tujuan Pengembangan Pariwisata

Tujuan pengembangan pariwisata, bukan hanya sekadar peningkatan perolehan devisa bagi negara, akan tetapi lebih jauh diharapkan pariwisata dapat berperan sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*). Dilihat dari sudut ekonomi, sedikitnya ada delapan keuntungan pengembangan pariwisata di Indonesia:

- (1) Peningkatan kesempatan berusaha.
- (2) Kesempatan kerja.

- (3) Peningkatan penerimaan pajak.
- (4) Peningkatan pendapatan nasional.
- (5) Percepatan proses pemerataan pendapatan.
- (6) Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan.
- (7) Memperluas pasar produk dalam negeri. Dan
- (8) Memberikan dampak multiplier effect dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri.

Begitu banyak keuntungan yang bakal dapat diraih, maka pengembangan pariwisata sebagai suatu industri tidak dapat dilakukan sebagai pekerjaan sambilan, akan tetapi hendaknya diperlakukan sebagai suatu bisnis yang harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, hukum permintaan dan penawaran, serta strategi perdagangan yang harus dikelola secara professional (Yoeti. A, 2008:XIX). (*Nurhayati, 2013*)

Pengembangan pariwisata sangat diperlukan pada suatu daerah tujuan wisata. Menurut Instruksi Presiden tahun 1969 tujuan pengembangan kepariwisataan adalah:

- (a) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

(b) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan indonesia.

(c) Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.
(*Basuki, 2019*)

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut **Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60)**, mengatakan bahwa “berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”. Sedangkan menurut **Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017:60)** “kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”. (*Mallisa, 2017*)

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pengertian menurut para ahli diatas bahwa kerangka berpikir adalah tentang bagaimana teori-teori yang saling berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang telah diartikan sebagai masalah yang penting, kerangka berpikir merupakan suatu penjelasan yang sementara waktu secara konseptual tentang keterkaitan dan hubungannya pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.

Dampak dari adanya aktifitas pariwisata di Kabupaten Belitung bisa dilihat dari seberapa besar pengeluaran (*spending*) yang dikeluarkan oleh para wisatawan di Kabupaten Belitung. Pengeluaran ada penentunya, bisa dilihat dari faktor internal wisatawan bisa juga dilihat dari faktor eksternalnya. Faktor eksternal misalnya adalah

pariwisata, jumlah barang dan jasa yang digunakan. Sedangkan faktor internalnya pendapatan daerah.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peran yang sangat strategis untuk pembangunan perekonomian nasional. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya atau antara suatu negara dengan negara lainnya. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali, menginventarisir dan mengembangkan sektor-sektor pariwisata yang ada sebagai daya tarik bagi wisatawan. Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu cara dengan mengembangkan sektor pariwisata, pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan pengembangan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan sektor pariwisata yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah. Proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sektor pariwisata sangat berkaitan dengan strategi dan upaya yang dilakukan oleh khususnya Dinas Pariwisata daerah setempat, sehingga dengan adanya strategi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar terus meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, kerangka berpikir dari strategi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata Kabupaten Belitung, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2. Kerangka Berpikir

2.3. Proposisi

Menurut **Singarimbun dan Effendi (1995:36)** dalam peristiwa sosial biasanya dikenal dua tipe proposisi, yakni aksioma atau *postulat* dan *teorem*. Aksioma atau postulat ialah proposisi yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi oleh peneliti sehingga tidak perlu diuji dalam penelitian, ialah contoh sebuah proposisi yang kebenarannya tidak dipertanyakan. Sedangkan *teorem* ialah proposisi yang diedukasikan dari *aksioma*". (Anjas Bee, 2012)

Proposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta, sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi terdiri atas empat unsur, dua diantaranya merupakan materi pokok proposisi, sedangkan dua yang lain sebagai hal yang menyertainya. Empat unsur yang dimaksud ialah term sebagai subjek, term sebagai predikat, kopula dan kuantor. (*Setiawan, 2021b*)

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi dari **“Strategi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Kabupaten Belitung”**, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Salah satu upayanya dengan mengembangkan sektor pariwisata daerah di bidang Pariwisata.